



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp & Fax (0291) 435018
KUDUS - 59313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 706/ 10.1 / 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang terukur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, maka diperlukan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur ;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yag bersih dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

4. Undang - undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor 344.2/ /2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasi Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus terdiri dari :

a. Sekretaris

- a. **Sekretaris**
 - 1. SOP Pengajuan Rentra dan Renja Anggaran Sekretariat
 - 2. SOP Pengajuan Rentra dan Dokumen Anggaran Sekretariat
 - 3. SOP Pengkoordinasian Rentra dan Renja Anggaran Sekretariat
 - 4. SOP Pendaftaran tanpa cek lapangan;
 - 5. SOP Pelayanan Legalisir.
 - 6. SOP Apel Pagi;
 - 7. SOP Administrasi Surat Masuk;
 - 8. SOP Administrasi Surat Keluar;
 - 9. SOP Pengajuan SPP GU;
 - 10. SOP Pengajuan SPM GU;
- a.1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
 - 1. SOP Apel Pagi;
 - 2. SOP Administrasi Surat Masuk;
 - 3. SOP Administrasi Surat Keluar;
 - 4. SOP Pendaftaran tanpa cek lapangan;
 - 5. SOP Pelayanan Legalisir.
- a.2. **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan**
 - 1. SOP Pengajuan Rentra dan Renja Anggaran;
 - 2. SOP Pengajuan Rentra dan Dokumen Anggaran;
 - 3. SOP Pengkoordinasian Rentra dan Renja Anggaran;
 - 4. SOP Pengajuan SPP GU;
 - 5. SOP Pengajuan SPM GU;
- b. **Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
 - 1. SOP Pengkajian Regulasi;
 - 2. SOP Pelaksanaan Koordinasi Penanaman Modal ;
 - 3. SOP Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal
 - 4. SOP Pameran Investasi;
 - 5. SOP Permintaan Brosur;
 - 6. SOP Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - 7. SOP Kerjasama Penanaman Modal
 - 8. SOP Pelayanan Informasi Penanaman Modal
- b.1. **Seksi Perencanaan Penanaman Modal**
 - 1. SOP Pengkajian Regulasi;
 - 2. SOP Pelaksanaan Koordinasi Penanaman Modal ;
 - 3. SOP Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal
- b.2. **Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
 - 1. SOP Pameran Investasi;
 - 2. SOP Permintaan Brosur;
 - 3. SOP Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - 4. SOP Kerjasama Penanaman Modal;
 - 5. SOP Pelayanan Informasi Penanaman Modal.
- c. **Kepala Bidang...**

- c. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 1. SOP Pengajuan Hak Akses Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - 2. SOP Pelaporan LKPM Online;
 - 3. SOP Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal;
 - 4. SOP Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal;
 - 5. SOP Verifikasi & Validasi LKPM Online.
 - 6. SOP Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal;
 - 7. SOP Tata Cara Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
 - 8. SOP Tata Cara Penutupan Perusahaan Penanaman Modal;
 - 9. SOP Tata Cara Pembatalan Perizinan Penanaman Modal;
 - 10. SOP Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
 - 11. SOP Penanganan Pengaduan Perizinan Penanaman Modal.
- c.1. Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan
 - 1. SOP Pengajuan Hak Akses Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 - 2. SOP Pelaporan LKPM Online;
 - 3. SOP Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal;
 - 4. SOP Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal;
 - 5. SOP Verifikasi & Validasi LKPM Online.
- c.2. Kepala Seksi Pengawasan
 - 1. SOP Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal;
 - 2. SOP Tata Cara Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
 - 3. SOP Tata Cara Penutupan Perusahaan Penanaman Modal;
 - 4. SOP Tata Cara Pembatalan Perizinan Penanaman Modal;
 - 5. SOP Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
 - 6. SOP Penanganan Pengaduan Perizinan Penanaman Modal.
- d. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
 - 1. SOP Pelayanan Permohonan izin Lokasi;
 - 2. SOP Pelayanan Permohonan IMB;
 - 3. SOP Pelayanan Permohonan Izin Gangguan;
 - 4. SOP Pelayanan Permohonan Rumah Sakit Type C dan Type D;
 - 5. SOP Pelayanan Permohonan Rumah Sakit Khusus Type C ;
 - 6. SOP Pelayanan Permohonan Izin Klinik Pratama dan Utama;
 - 7. SOP Pelayanan Permohonan izin Laboratorium Klinik Swasta maupun Pemerintah;
 - 8. SOP Pelayanan Permohonan Izin Apotek ;
 - 9. SOP Pelayanan Permohonan Izin Toko Obat
 - 10. SOP Pelayanan Permohonan Izin Optik;
 - 11. SOP Pelayanan Permohonan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan;
 - 12. SOP Pelayanan Permohonan Izin Reklame;

13. SOP Pelayanan Permohonan Izin Surat Izin Jasa Konstruksi;
 14. SOP Pelayanan Permohonan Izin Pemakaman;
 15. SOP Pelayanan Permohonan Izin Trayek;
 16. SOP Pelayanan Permohonan Izin Warnet;
 17. SOP Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah;
- d.1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan
1. SOP Pelayanan Permohonan izin Lokasi;
 2. Pelayanan Permohonan IMB;
 3. SOP Pelayanan Permohonan Rumah Sakit Type C dan Type D;
 4. SOP Pelayanan Permohonan Rumah Sakit Khusus Type C ;
 5. SOP Pelayanan Permohonan Izin Klinik Pratama dan Utama;
 6. SOP Pelayanan Permohonan izin Laboratorium Klinik Swasta maupun Pemerintah;
 7. SOP Pelayanan Permohonan Izin Surat Izin Jasa Konstruksi;
 8. SOP Pelayanan Permohonan Izin Pemakaman;
 9. SOP Pelayanan Permohonan Izin Toko Obat;
 10. SOP Pelayanan Permohonan Izin Optik.
- d.2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan;
1. SOP Pelayanan Permohonan Izin Gangguan (HO);
 2. SOP Pelayanan Permohonan Izin Warnet;
 3. SOP Pelayanan Permohonan Izin Trayek;
 4. SOP Pelayanan Permohonan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan;
 5. SOP Pelayanan Permohonan Izin Reklame;
 6. SOP Pelayanan Rekomendasi Pengeboran Pemanfaatan Air Tanah;
- e. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha
1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. SOP Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal;
 3. SOP Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. SOP Izin Usaha Penanaman Modal;
 5. SOP izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 6. SOP izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 7. SOP Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Penanaman Modal;
 8. SOP izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
 9. SOP Pelayanan Permohonan Izin Rumah Potong Gas Unggas
 10. SOP Pelayanan Permohonan Izin Rumah Potong Hewan (RPH);
 11. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Industri (IUI);
 12. SOP Pelayanan Permohonan Izin Perluasan Industri (IPI);
 13. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI);
 14. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

15. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 16. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 17. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 18. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 19. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 20. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Peternakan;
 21. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Obat Hewan;
 22. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Jasa Medik Veteriner
 23. SOP Pelayanan Permohonan Izin Kios Daging;
 24. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Sarang Burung Walet;
 25. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi;
 26. SOP Pelayanan Permohonan Usaha Jasa Angkutan ;
 27. SOP Pelayanan Permohonan Usaha Sekolah Mengemudi;
 28. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Bengkel Umum;
 29. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Travel;
 30. SOP Pelayanan Permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir;
 31. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 32. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Hotel Bintang/Melati/Wisma/Pemondokan.
- e.1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perekonomian.
1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. SOP Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal;
 3. SOP Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. SOP Izin Usaha Penanaman Modal;
 5. SOP Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 6. SOP Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 7. SOP Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Penanaman Modal;
 8. SOP Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
 9. SOP Pelayanan Permohonan Izin Lokasi;
 10. SOP Pelayanan Permohonan Izin Rumah Potong Unggas
 11. SOP Pelayanan Permohonan Izin Rumah Potong Hewan (RPH);
- e.2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha.
1. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Industri (IUI);
 2. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

6. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
7. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
8. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
9. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Peternakan;
10. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Obat Hewan;
11. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Jasa Medik Veteriner;
12. SOP Pelayanan Permohonan Izin Kios Daging;
13. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Sarang Burung Walet;
14. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Penggilingan Padi;
15. SOP Pelayanan Permohonan Usaha Jasa Angkutan ;
16. SOP Pelayanan Permohonan Usaha Sekolah Mengemudi;
17. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Bengkel Umum;
18. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Travel;
19. SOP Pelayanan Permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir;
20. SOP Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
21. SOP Pelayanan Permohonan Izin Usaha Hotel Bintang/Melati/Wisma/Pemondokan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Maret 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**


*** REVLISIANTO SUBEKTI**

Tembusan :
Bupati Kudus (sebagai laporan);